

**Megatrikania Kendali**Analis Legislatif Ahli Pertama
megatrikania.kendali@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berpotensi mengganggu terhadap ketahanan pangan wilayah. Dampak utama yang ditimbulkan berupa meningkatnya ancaman gagal panen serta menurunnya kapasitas produksi komoditas pangan strategis, khususnya padi. Selama ini, ketiga provinsi tersebut merupakan pusat produksi beras di Pulau Sumatra, sehingga setiap penurunan hasil produksi secara langsung memengaruhi ketersediaan pangan, baik pada tingkat daerah maupun nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan terjadinya peningkatan produksi beras nasional pada periode November 2025 hingga Januari 2026, termasuk potensi kenaikan sebesar 5,49 persen di Aceh, 24,34 persen di Sumatra Utara, dan 0,8 persen di Sumatra Barat. Meskipun mencerminkan arah yang positif, pencapaian tersebut tetap sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan belum sepenuhnya terbebas dari ancaman bencana hidrometeorologi. Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan optimisme bahwa dampak banjir terhadap produksi nasional masih tergolong rendah, mengingat luas areal tanam yang mencapai 7,3 juta hektare dengan proporsi lahan terdampak yang relatif kecil.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sepanjang tahun 2010–2024 lebih dari 2,26 juta hektare lahan sawah di Indonesia mengalami kerusakan akibat bencana, dengan sekitar 90 persen di antaranya disebabkan oleh banjir. Sejalan dengan temuan tersebut, data Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan bahwa Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat secara konsisten mengalami banjir pada periode tahun 2019–2023, dengan luas sawah tergenang berkisar antara 163.559 hingga 380.998 hektare serta tanaman padi puso antara 40.625 hingga 85.915 hektare. Fakta ini menegaskan bahwa banjir merupakan ancaman yang berulang dan memerlukan upaya penanganan serta mitigasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil identifikasi tim lapangan Kementan mencatat sekitar 27.000 hektare sawah terdampak banjir di tiga provinsi tersebut, dengan 385 hektare tanaman padi mengalami puso dan sekitar 200 hektare jagung gagal panen. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat melaporkan potensi kerugian belum termasuk irigasi yang rusak sekitar Rp13 miliar. Sementara total kerugian sektor pertanian di Sumatra Utara ditaksir mencapai Rp922,2 miliar yang mencakup kerusakan tanaman pangan, hortikultura, dan jaringan irigasi tersier. Sementara berdasarkan data Celios, estimasi kerugian sektor pertanian pangan di Aceh mencapai Rp60 miliar.

Upaya penanganan telah dilakukan pemerintah melalui koordinasi Badan Pangan Nasional, Kementan, dan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan di wilayah terdampak. Penambahan stok beras, penyaluran bantuan pangan kepada keluarga berpenghasilan rendah, dan penyediaan benih serta obat-obatan peternakan menjadi langkah awal yang ditempuh. Menteri Pertanian telah menginstruksikan percepatan distribusi cadangan pangan pemerintah (CPP), mencakup komoditas beras dan minyak goreng. Selain itu, tim gabungan telah dikerahkan untuk menyalurkan bantuan serta melakukan pendataan kebutuhan pangan secara faktual di wilayah-wilayah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kementerian juga telah menyusun delapan strategi antisipasi perubahan iklim, mulai dari pemetaan wilayah rawan, pembentukan brigade penanganan, penguatan sistem irigasi, perbaikan drainase, penggunaan benih adaptif, penanganan hama, peningkatan penyuluhan, hingga penyediaan bantuan benih. Selain itu, anggota Komisi IV DPR RI, Endang S. Thohari, menekankan pentingnya memperkuat peran penelitian dalam pengembangan varietas unggul dan inovasi teknologi pertanian.

Atensi DPR

Komisi IV DPR RI perlu mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan terhadap bencana hidrometeorologi. Melalui fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI perlu memastikan efektivitas program mitigasi dan adaptasi iklim, termasuk penyaluran CPP, distribusi bantuan benih, serta percepatan rehabilitasi lahan pertanian yang mengalami kerusakan. Komisi IV DPR RI juga perlu mengevaluasi kesiapan sistem peringatan dini, keandalan data kerawanan bencana, dan koordinasi antara Kementerian, pemerintah daerah, serta lembaga terkait. Melalui fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI dapat mendorong peningkatan alokasi untuk pembangunan dan perbaikan irigasi, penguatan penyuluhan, serta dukungan bagi asuransi pertanian. Selain itu, pembiayaan riset varietas unggul dan teknologi pertanian adaptif perlu diprioritaskan agar petani memiliki ketahanan yang lebih kuat menghadapi risiko bencana.

Sumber

antaranews.com, 3 Desember 2025;
celios.co.id, 1 Desember 2025;
cnnindonesia.com, 4 Desember 2025;
kompas.id, 1, 2, dan 5 Desember 2025; dan
republika.co.id, 28 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R
Anugrah Juwita S

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making